

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum ; Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*.
Gunung Agung.
- Apriliana, L. Z. (2019). Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>
- Aucla. (2019). *REKONSTRUKSI KEBIJAKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA*. 8(5), 55.
- Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berjalan Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen Widya Cipta*, 2(2), 219.
- Faza, K. (2021). *Pro-kontra Rencana Pemberlakuan Tilang Elektronik di Kota Bandung*. <https://ayobandung.com/read/2021/02/03/183922/pro-kontra-rencana-pemberlakuan-tilang-elektronik-di-kota-bandung>
- GHULAM M, N. (2018). *Polisi Temukan Sejumlah Kendala dalam Penerapan Tilang ETLE - Kompas.com*. 1–7.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/07/14320881/polisi-temukan-sejumlah-kendala-dalam-penerapan-tilang-etle>

Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *WIDYA Yustisia*, 1(1), 52–60.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2016). *Denda Tilang sebagai PNPB Kejaksaan*. Komisi-Kejaksaan.Go.Id. <https://komisi-kejaksaan.go.id/denda-tilang-sebagai-pnbp-kejaksaan/>

kominfo. (2018). *Polri,MA, dan Kejagung Mematangkan Pelaksanaan Sistem E-Tilang*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/12715/polri-ma-dan-kejagung-matangkan-pelaksanaan-sistem-e-tilang/0/berita>

Marka. (2004). Keselamatan Lalu Lintas. *Edisi XXV*.

Mulyana, Y. (2021). *TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEMEGANG JABATAN DIHUBUNGAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK*. 1(5), 713–722.

Muzaki, L. (2013). Rambu Rambu Lalu Lintas. *Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, November*, 1–10. <http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/350.html>

Nugraheny, D., & Retnowati, N. D. (2021). Sistem Informasi Strategis Terhadap E-Government Guna Peningkatan Masyarakat Informasi. *In Seri Prosiding Seminar Nasional Dinamika Informatika*, (Vol. 5, N, 92–99).

Onilne.com, H. (n.d.). *Perma perkara E-Tilang*. <http://hukumonline.com/berita/baca/It585a7019e0a5d/perma-perkara-tilang->

terbit-ini-poin-yang-layak-anda-ketahui

- Poerwadarminta, W. (1993). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia, (2016).
- Putsanra, D. V. (2006). Isi denda tilang slip biru sesuai pasal 287 ayat 1 UU lalu lintas. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/isi-denda-tilang-slip-biru-sesuai-pasal-287-ayat-1-uu-lalu-lintas-ehsc>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Rakhmadani, S. (2017). E-Ticketed (E-Tilang) Application Analysis in Delivering Good Governance in Indonesia. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 7(3), 663–671.
- Said H, B. (2000). *Ringkasan Hukum Pidana*. FH.Unpas.
- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kurangi dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1), 71.
<https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Saputra, P. N. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement(ETLE) Dan Permasalahannya. *Jurnal Info Singkat Kajian Hukum DPR RI*, 13(7), 1–6.

<http://berkas.dpr.go.id/>

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. endah. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 754–766.

Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum* (Issue 1985).

Tamin, B. E. D. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Lex Administratum*, VI(3), 112–121.

Tren, N. (2021). *Catat , Ini 21 Lokasi Kamera Tilang Elektronik di Bandung*.
<https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/24/071200715/catat-ini-21-lokasi-kamera-tilang-elektronik-di-bandung>

UAD, fakultas hukum. (2012). *PENEGAKAN HUKUM*.
<https://www.google.com/search?q=penegakan+hukum+adalah&ie=utf-8&oe=utf-8&c>

Widyaningsih, N. D. (2013). The Relationship Between The Right of The People in Kan Society with Community Awareness in Village Development (Correlation Study in Temuwangi Village, Pedan District Klaten Regency, 2009-2010). *Educitizen*, 1(1), 68–77.

Yasin, M. (2017). *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. 30, xx+326.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992

PERMA NO.12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas